



PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

JL RADIN INTEN II NO.3 DUREN SAWIT TELP : 86902313 FAX : 86902314

Nomor : W9-A/ /OT.01.2/5/2019 Mei 2019
Lampiran : 3 (tiga) halaman
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Yth. Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat
di
Jakarta

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Surat Keputusan MENPAN Nomor KEP-135/M.PAN/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 jo. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor 1080/BP/OT.01.2/5/2018, disampaikan hal-hal :

1. Evaluasi atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Jakarta Pusat dimaksudkan untuk:
 - a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
 - b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi.
 - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.
2. - Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen manajemen kinerja, meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja.
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2018, merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan Kinerja (PK) serta dokumen terkait lainnya.
3. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai mulai dari 0 s.d 100.
Setiap jawaban “**Ya**” akan diberikan nilai **1**, sedangkan jawaban “**Tidak**” akan diberikan nilai **0**, untuk jawaban **a/b/c/d/e**, penilaian didasarkan pada *judgement* evaluator dengan kriteria sebagai berikut :

Jawaban	Kriteria	Nilai
a	Memenuhi hampir semua kriteria (lebih dari 80% s/d 100%)	1
b	Memenuhi sebagian besar kriteria (lebih dari 60% s/d 80%)	0,75

c	Memenuhi sebagian kriteria (lebih dari 40% s/d 60%)	0,50
d	Memenuhi sebagian kecil kriteria (lebih dari 20% s/d 40%)	0,25
e	Sangat kurang memenuhi kriteria (kurang dari atau sama dengan 20%)	0

4. Pengadilan Agama Jakarta Pusat memperoleh nilai sebesar **79,79 / (BB)**
5. Nilai tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. **Perencanaan Kinerja = Bobot 30% nilai yang diperoleh 26,57%:**
 - 1) Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) telah ada dan memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, target tahunan, dan target jangka menengah tetapi belum hal-hal yang seharusnya ditetapkan dalam kontrak kinerja.
 - 2) Rencana Kinerja Tahunan (RKT) telah ada memuat sasaran, indikator kinerja sasaran, target kinerja tahunan dan menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU).
 - 3) Dokumen Penetapan Kinerja (PK) telah ada, disusun segera setelah anggaran disetujui dan PK telah menyajikan IKU serta sasaran telah berorientasi hasil.
 - b. **Pengukuran Kinerja = Bobot 25% nilai yang diperoleh 20,67%:**
 - 1) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal dan penilaian kinerja untuk dipergunakan dalam penyusunan laporan kinerja.
 - 2) Indikator Kinerja Utama (IKU) sudah diukur secara obyektif, sudah relevan dengan kondisi yang diukur dan pengumpulan data kinerja sudah dapat diandalkan.
 - c. **Pelaporan Kinerja = Bobot 15% nilai yang diperoleh 12,80%**
 - 1) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 telah disusun dan disampaikan tepat waktu.
 - 2) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian kinerja, namun tidak selaras dengan informasi keuangan dalam laporan tahunan.
 - 3) LkjIP sudah menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya.
 - d. **Evaluasi Kinerja = Bobot 10% nilai yang diperoleh 4,75%:**
Monitoring dan Evaluasi belum dilaksanakan dan hasil pemantauan terhadap kinerja/kegiatan belum sepenuhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan penerapan manajemen kinerja.
 - e. **Pencapaian Kinerja = Bobot 20% nilai yang diperoleh 15,00%:**
Informasi kinerja dan keselarasan kinerja secara umum menunjukkan capaian kinerja output/outcome dan perlu dipertahankan.

6. Rekomendasi

Berdasarkan hal diatas direkomendasikan:

a. Perencanaan Kinerja

- 1) Agar dokumen Renstra menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi).
- 2) Agar Dokumen PK dilakukan monitor pencapaiannya secara berkala.

b. Pengukuran Kinerja

Agar Pengumpulan data kinerja dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester).

c. Pelaporan Kinerja

- 1) Agar menyajikan informasi keuangan yang selaras dengan yang ada pada laporan tahunan.
- 2) Agar informasi yang disajikan digunakan dalam perbaikan perencanaan serta digunakan untuk peningkatan kinerja.

d. Evaluasi Kinerja

Agar dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan hasil dari monitoring dan evaluasi tersebut ditindaklanjuti guna perbaikan kinerja di tahun berikutnya dan perbaikan penerapan manajemen kinerja.

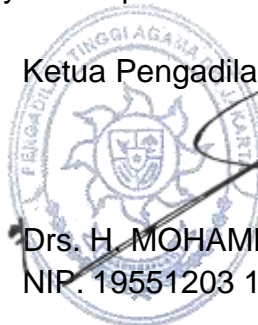
e. Pencapaian Kinerja

Agar kehandalan informasi dan keselarasan kinerja lebih diperhatikan dan kedepannya bisa melakukan peningkatan kinerja yang lebih baik.

Demikian hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun 2018, dengan harapan agar rekomendasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti dan dijadikan sebagai sarana peningkatan kinerja Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta



Drs. H. MOHAMMAD YAMIN AWIE, S.H., M.H.
NIP. 19551203 198103 1 001

Tembusan Yth:

1. Kepala Badan Pengawasan MA RI;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi c.q. Biro Perencanaan dan Organisasi.

**KERTAS KERJA EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DILINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI
SATUAN KERJA : PA JAKARTA PUSAT
TAHUN : 2018**

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN/BOBOT (%)	UNIT KERJA		TOTAL
		Y/T	NILAI	
1	2	3	4	5
A. PERENCANAAN KINERJA (30%)				26.57
I. RENCANA STRATEGIS (10%)				9.32
a. PEMENUHAN RENSTRA (2%)				
1	Dokumen Renstra telah ada	y	1	1.00
2	Dokumen Renstra telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, target tahunan, indikator kinerja tujuan dan target jangka menengah	a	1	1.00
				2.00
b. KUALITAS RENSTRA (5%)				
3	Tujuan dan sasaran telah berorientasi hasil	a	1	0.71
4	Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program	a	1	0.71
5	Renstra telah menyajikan IKU	a	1	0.71
6	Indikator kinerja tujuan (output/outcome) dan sasaran (output/outcome) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik	a	1	0.71
7	Target kinerja ditetapkan dengan baik	a	1	0.71
8	Dokumen Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMN/Dokumen Renstra atasannya	a	1	0.71
9	Dokumen Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi)	b	0.75	0.54
				4.82
c. IMPLEMENTASI RENSTRA (3%)				
10	Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan	b	0.75	0.75
11	Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran	b	0.75	0.75
12	Dokumen Renstra telah direviu secara berkala	a	1	1.00
				2.50
II. PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (7,5%)				7.06
a. PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (1,5%)				
1	Dokumen RKT telah ada	y	1	0.50
2	Dokumen RKT disusun sebelum mengajukan RKA	y	1	0.50
3	Dokumen RKT telah memuat sasaran, indikator kinerja sasaran, dan target kinerja tahunan	a	1	0.50
				1.50
b. KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (3,75%)				
4	Sasaran telah berorientasi hasil	a	1	0.63
5	Target dalam dokumen RKT merupakan cara untuk mencapai sasaran	a	1	0.63
6	RKT telah menyajikan IKU	a	1	0.63
7	Indikator kinerja sasaran dan kegiatan telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik	b	0.75	0.47
8	Target kinerja ditetapkan dengan baik	a	1	0.63
9	Dokumen RKT telah selaras dengan dokumen Renstra	a	1	0.63
				3.59
c. IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (2,25%)				
10	Dokumen RKT telah digunakan sebagai acuan untuk menyusun perjanjian kinerja (PK)	a	1	1.13
11	Dokumen RKT telah digunakan sebagai acuan untuk menyusun anggaran (RKA) (a.l. Target kinerja RKT vs Target kinerja RKA)	b	0.75	0.84
				1.97

III.	DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA (12,5%)			10.18
a.	PEMENUHAN PK (2%)			
1	Dokumen PK unit kerja telah ada	y	1	0.67
2	Dokumen PK disusun segera setelah anggaran disetujui	y	1	0.67
3	Dokumen PK telah memuat sasaran, indikator kinerja, dan target jangka pendek	a	1	0.67
				2.00
b.	KUALITAS PK (6.5%)			
4	Sasaran telah berorientasi hasil	a	1	1.30
5	PK telah menyajikan IKU	a	1	1.30
6	Indikator kinerja sasaran telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik	b	0.75	0.98
7	Target kinerja ditetapkan dengan baik	b	0.75	0.98
8	Dokumen PK telah selaras dengan dokumen RKT	a	1	1.30
				5.85
c.	IMPLEMENTASI PK (4%)			
9	Dokumen PK telah dimonitor pencapaiannya secara berkala	d	0.25	0.33
10	Dokumen PK telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan	b	0.75	1.00
11	Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan	b	0.75	1.00
				2.33
B.	PENGUKURAN KINERJA (25%)			20.67
I.	PEMENUHAN PENGUKURAN (5%)			
1	Telah terdapat indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal	y	1	2.50
2	Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja	a	1	2.50
				5.00
II.	KUALITAS PENGUKURAN (12,5%)			
3	IKU telah dapat diukur secara obyektif	a	1	1.04
4	IKU telah menggambarkan hasil	a	1	1.04
5	IKU telah relevan dengan kondisi yang akan diukur	a	1	1.04
6	IKU telah cukup untuk mengukur kinerja	b	0.75	0.78
7	IKU telah diukur realisasinya	b	0.75	0.78
8	Indikator kinerja sasaran dapat diukur secara obyektif	a	1	1.04
9	Indikator kinerja sasaran menggambarkan hasil	a	1	1.04
10	Indikator kinerja sasaran relevan dengan sasaran yang akan diukur	b	0.75	0.78
11	Indikator kinerja sasaran cukup untuk mengukur sasarnya	b	0.75	0.78
12	Indikator kinerja sasaran telah diukur realisasinya	b	0.75	0.78
13	Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan	b	0.75	0.78
14	Pengumpulan data kinerja dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester)	c	0.5	0.52
				10.42
III.	IMPLEMENTASI PENGUKURAN (7,5%)			
15	IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran	b	0.75	1.13
16	IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja	b	0.75	1.13
17	IKU telah direviu secara berkala	a	1	1.50
18	Hasil pengukuran kinerja telah digunakan untuk penyusunan laporan kinerja	b	0.75	1.13
19	Pengukuran kinerja digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala	d	0.25	0.38
				5.25
C.	PELAPORAN KINERJA (15%)			12.80
I.	PEMENUHAN PELAPORAN (3%)			
1	LKjIP telah disusun	y	1	1.50
2	LKjIP telah disampaikan tepat waktu	y	1	1.50
				3.00
II.	KUALITAS PELAPORAN (7,5%)			
3	LKjIP menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi output/outcome	a	1	1.07

4	LKjIP menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU	a	1	1.07
5	LKjIP menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan	a	1	1.07
6	LKjIP menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja	a	1	1.07
7	LKjIP menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan	b	0.75	0.80
8	LKjIP menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian kinerja	c	0.5	0.54
9	Informasi kinerja dalam LKjIP dapat diandalkan	b	0.75	0.80
				6.43
III. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4,5%)				
10	Informasi yang disajikan telah digunakan dalam perbaikan perencanaan	b	0.75	0.84
11	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi	b	0.75	0.84
12	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk peningkatan kinerja	b	0.75	0.84
13	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk penilaian kinerja	b	0.75	0.84
				3.38
D. EVALUASI INTERNAL (10%)				
I. PEMENUHAN EVALUASI (2%)				
1	Terdapat mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja	t	0	0.00
2	Terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya	b	0.75	0.75
				0.75
II. KUALITAS EVALUASI (5%)				
3	Monitoring dan evaluasi telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan manajemen kinerja yang dapat dilaksanakan	c	0.50	2.50
				2.50
III. PEMANFAATAN HASIL EVALUASI (3%)				
4	Rekomendasi monitoring dan evaluasi telah ditindaklanjuti untuk perbaikan penerapan manajemen kinerja	c	0.50	1.50
				1.50
E. CAPAIAN KINERJA (20%)				
I. KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) (7,5%)				
1	Target dapat dicapai	b	0.75	1.88
2	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya	b	0.75	1.88
3	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan	b	0.75	1.88
				5.63
II. KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME) (12,5%)				
4	Target dapat dicapai	b	0.75	3.13
5	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya	b	0.75	3.13
6	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan	b	0.75	3.13
				9.38
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)				
				79.79